



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut ini disusun berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dan mengacu kepada RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, integralistik, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang sama.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Renja Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat.

Pelaihari, Juni 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,

RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I /IV.b
NIP. 19840320 200212 2 002

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud Dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II_HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

 LALU..... 7

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 7

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... 20

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 27

 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 31

 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD..... 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34

 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 34

BAB V PENUTUP 67

 4.1 Kesimpulan 67

 4.2 Saran 67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Renja Tahun 2024 SKPD..... 8

Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 10

Tabel 2.2.1 Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian..... 24

Tabel 2.4.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 30

Tabel 3.2.1 Tabel Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut..... 33

Tabel 4.1.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Tanah Laut 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah membawa bangsa Indonesia memasuki gerbang peradaban informasi, banyak perubahan mendasar dan membawa dampak yang luas di bidang politik, ekonomi dan sosial yang harus dihadapi dengan arif dan hati-hati. Merupakan tantangan yang besar saat bangsa Indonesia berbenah diri dari keterpurukan untuk membangun Indonesia baru, pada saat itu pula harus memasuki era informasi. Untuk itu diperlukan suatu strategi komunikasi global untuk menghadapinya.

Pada saat ini Pemerintah Daerah Tanah Laut sedang bergerak cepat dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, atau sering disebut sebagai *E-Government*. Tantangan besar dalam implementasi *E-Government* terletak pada proses penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus fokus pada wawasan strategis di masa depan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi di Daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Perangkat Kerja Daerah telah menyusun dokumen perencanaan strategis SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu komponen dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut, Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 ialah mewujudkan tujuan **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan dinamis”**.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 adalah dokumen

rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2026, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2026.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai acuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Rancangan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja PD Tahun 2023

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah; analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah yang merupakan turunan dari pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah selama masa jangka menengah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta

pendanaan Renja Perangkat Daerah.

BAB V Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut terbentuk pada Tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi), dan masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis serta penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dalam tabel 2.1 Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Renja Tahun 2024 dan realisasi Renja Tahun Berjalan 2025 dalam tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.1.1 Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Renja Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks SPBE	Nilai	3,2	3,12	97,5	
	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Persentase pencapaian domain SPBE	Persen	64	62,4	97,5	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tersebarnya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persen	90	90	100	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika	Persen	100	100	100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase terselenggaranya statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	100	100	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase SKPD yang menyelenggarakan Pengamanan Informasi	Persen	50	77	154	

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	70,01	70,16	100,21	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika		Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	81	82,1	101,36	
		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM sekretariat Diskominfo	Nilai	84	82,60	98,33	

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra SKPD s/d Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
				I		II		III		IV					
2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai)	88	6.532.835.741		1.256.345.216		483.519.934		2.297.541.096		1.500.007.382	82	5.537.413.628	93,64%	84,76%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100 Persentasi)	100	2.942.225	30	-	50	1.100.000	90	-	100	1.650.000	270	2.750.000	270,00%	93,47%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	7	1.979.315	4	-	2	600.000	1	-	-	1.250.000	7	1.850.000	100,00%	93,47%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	962.910	2	-	2	500.000	-	-	2	400.000	6	900.000	100,00%	93,47%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	4.062.544.866	26	755.734.813	50	171.345.160	75	1.442.604.052	100	927.944.413	251	3.297.628.438	251,00%	81,17%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21	4.058.545.453	19	755.734.813	20	170.012.760	19	1.441.243.452	19	927.120.513	77	3.294.111.538	100,00%	81,16%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	3.999.413	-	-	4	1.332.400	1	1.360.600	-	823.900	5	3.516.900	100,00%	87,94%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100	30.000.000	25	-	50	-	75	29.200.000	100	-	250	29.200.000	250,00%	97,33%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	30.000.000	-	-	3	-	2	29.200.000	-	-	5	29.200.000	100,00%	97,33%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	646.390.825	25	196.459.785	50	199.269.545	75	78.938.400	100	135.001.965	250	609.669.695	250,00%	94,32%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	7.594.083	2	6.777.000	-	-	-	-	-	-	2	6.777.000	100,00%	89,24%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	194.064.669	2	28.351.800	4	119.348.200	1	32.351.800	-	1.000.000	7	181.051.800	100,00%	93,29%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	9.999.933	1	9.110.000	-	-	-	-	-	-	1	9.110.000	100,00%	91,10%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	14.999.622	1	900.000	-	1.846.000	-	3.632.400	1	4.914.800	2	11.293.200	100,00%	75,29%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	5.400.000	3	280.000	3	800.000	3	1.480.000	3	2.000.000	12	4.560.000	100,00%	84,44%
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000	-	-	-	-	-	-	2	14.800.000	2	14.800.000	100,00%	98,67%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150	399.095.000	63	150.840.985	12	77.275.345	21	41.474.200	54	112.287.165	150	381.877.695	100,00%	95,69%

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100	237.518	40	200.000	22	-	14	-	24	-	100	200.000	100,00%	84,20%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	170.001.949	-	-	60	70.138.125	100	88.001.400	-	-	160	158.139.525	160,00%	93,02%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	31	49.979.442	-	-	31	43.858.125	-	-	-	-	31	43.858.125	100,00%	87,75%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	29.557.507	-	-	4	26.280.000	-	-	-	-	4	26.280.000	100,00%	88,91%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	90.465.000	-	-	-	-	1	88.001.400	-	-	1	88.001.400	100,00%	97,28%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	100	1.483.240.076	25	292.488.618	50	29.957.104	75	612.247.541	100	388.081.604	250	1.322.774.867	250,00%	89,18%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	253.000.000	3	40.386.760	3	1.986.895	3	85.477.842	3	49.880.763	12	177.732.260	100,00%	70,25%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1.230.240.076	3	252.101.858	3	27.970.209	3	526.769.699	3	338.200.841	12	1.145.042.607	100,00%	93,07%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	137.715.800	10	11.662.000	30	11.710.000	65	46.549.703	100	47.329.400	205	117.251.103	205,00%	85,14%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	33.300.000	1	4.212.000	1	3.800.000	1	9.825.203	1	13.493.800	1	31.331.003	100,00%	94,09%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	62.815.800	8	7.450.000	8	6.110.000	8	25.018.500	8	21.442.600	8	60.021.100	100,00%	95,55%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	19.600.000	-	-	4	1.800.000	11	6.100.000	15	8.300.000	30	16.200.000	100,00%	82,65%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	22.000.000	-	-	-	-	1	5.606.000	-	4.093.000	1	9.699.000	100,00%	44,09%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	84,76%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tersebarnya informasi publik di Kabupaten Tanah Laut (%)	90	4.213.954.566		1.928.073.555		158.064.750		921.180.596		1.035.477.893	-	4.042.796.794	0,00%	95,94%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Persen)	100	4.213.954.566	30	1.928.073.555	60	158.064.750	80	921.180.596	100	1.035.477.893	270	4.042.796.794	270,00%	95,94%
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	12	21.996.500	3	3.735.000	3	600.000	3	1.162.500	3	10.492.500	12	15.990.000	100,00%	72,69%

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	12	50.000.000	3	4.421.250	3	5.887.500	3	16.943.750	3	10.057.500	12	37.310.000	100,00%	74,62%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	12	2.188.320.000	3	268.200.000	3	112.000.000	3	760.683.346	3	960.513.643	12	2.101.396.989	100,00%	96,03%
Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	120	351.550.000	67	94.742.305	16	38.527.250	25	109.745.500	12	54.414.250	120	297.429.305	100,00%	84,61%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)	3	29.981.828	1	3.555.000	1	1.050.000	1	18.545.500	-	-	3	23.150.500	100,00%	77,22%
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	20	1.572.106.238	18	1.553.420.000	2	-	-	14.100.000	-	-	20	1.567.520.000	100,00%	99,71%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	95,94%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika (%)	100	4.005.986.388		1.299.509.999		1.339.699.001		180.345.000		1.026.797.500	-	3.846.351.500	0,00%	96,02%

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemmerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintahd daerah kabupaten/kota (Persen)	100	3.901.586.388	35	1.299.509.999	70	1.339.699.001	75	160.095.000	100	957.947.500	100	3.757.251.500	100,00%	96,30%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	1	3.901.586.388	-	1.299.509.999	1	1.339.699.001	-	160.095.000	-	957.947.500	1	3.757.251.500	100,00%	96,30%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100	104.400.000	10	-	20	-	80	20.250.000	100	68.850.000	100	89.100.000	100,00%	85,34%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)	3	104.400.000	-	-	-	-	1	20.250.000	2	68.850.000	3	89.100.000	100,00%	85,34%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	96,02%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase terselenggaranya statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut (%)	100	88.484.570	-			5.400.000		41.712.000		27.677.320	-	74.789.320	0,00%	84,52%

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Tanah Laut (Persen)	100	88.484.570	10	-	30	5.400.000	70	41.712.000	100	27.677.320	210	74.789.320	210,00%	84,52%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)	1	19.584.570	-	-	-	-	1	-	-	19.582.570	1	19.582.570	100,00%	99,99%
Membangun Metadata Statistik Sektoral	*Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)	5	28.400.000	-	-	-	5.400.000	-	8.212.000	5	8.094.750	5	21.706.750	100,00%	76,43%
Pengembangan Infrastruktur	*Jumlah Infrastruktur Statistik (Unit)	1	40.500.000	-	-	-	-	1	33.500.000	-	-	1	33.500.000	100,00%	82,72%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	84,52%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase SKPD yang menyelenggarakan Pengamanan Informasi (%)	100	209.364.424		-		-		7.775.000		181.325.000	-	189.100.000	0,00%	90,32%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten (Persen)	100	209.364.424	10	-	20	-	80	7.775.000	100	181.325.000	210	189.100.000	210,00%	90,32%

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	1	42.636.786	-	-	-	-	-	-	1	40.515.000	1	40.515.000	100,00%	95,02%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	20	166.727.638	-	-	5	-	4	7.775.000	11	140.810.000	20	148.585.000	100,00%	89,12%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	90,32%
				Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		15.050.625.689		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										100,00%	90,96%
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan pasal 17 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Kepala Dinas
 - a. Fungsi Kepala Dinas :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
 - 5) Pembinaan UPT Dinas; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, disebutkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

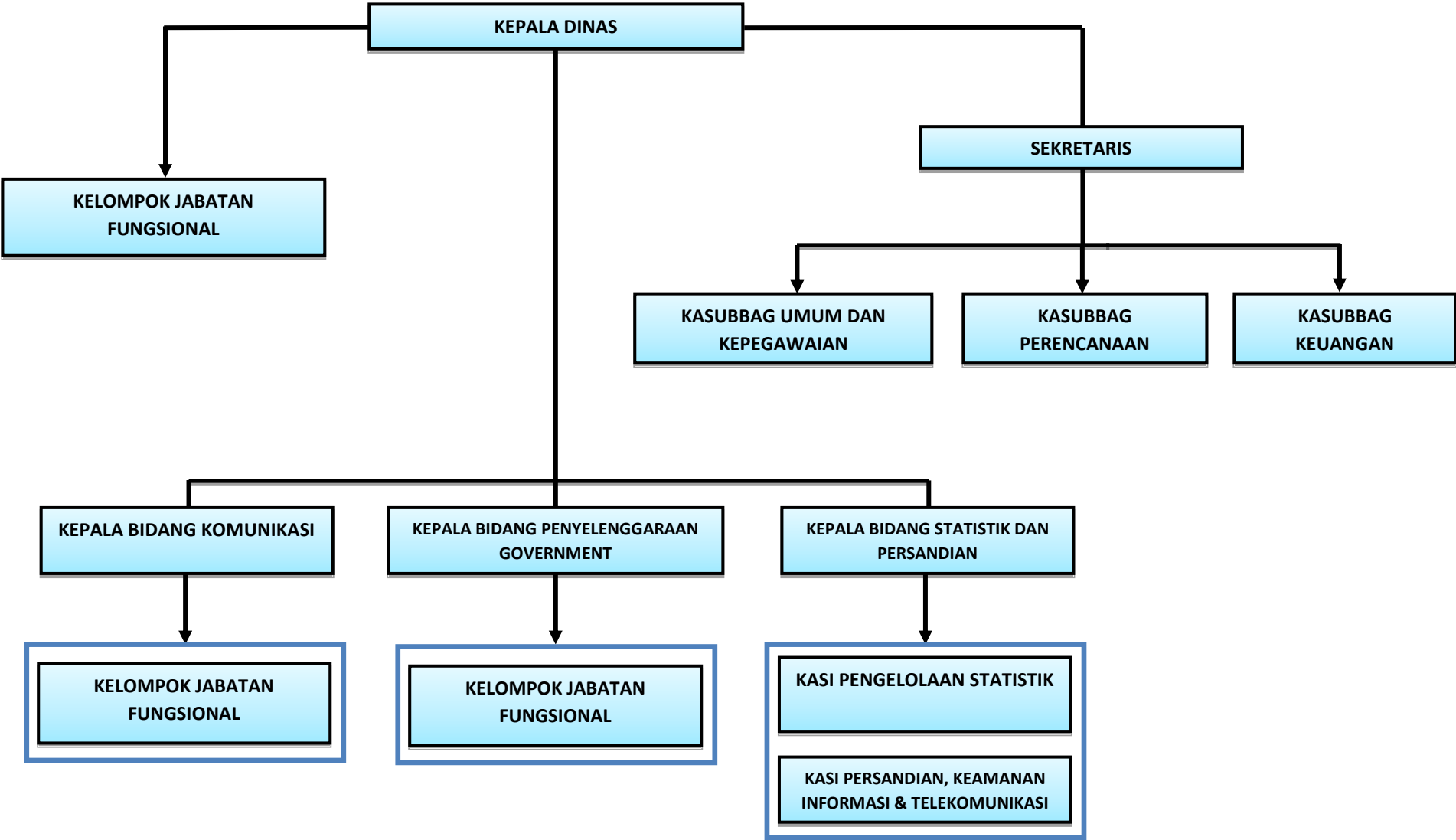
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub bagian, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Seksi, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Komunikasi
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government
- e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi;
 - 1. Seksi Pengelolaan Statistik
 - 2. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 sebagai berikut:

STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH LAUT



Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jumlah pada bulan Desember 2024:

No	Status	Jumlah
1	PNS	18
2	CPNS	-
3	PPPK	2
3	PTT	20
Jumlah		40

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut yang dikaitkan dengan target dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.2.1

Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi

No.	Indikator	Satuan	SPM/Standar nasional	IKK	Data awal	Target Renstra Perangkat Daerah			Data awal	Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai/indeks	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Domain 1 - Kebijakan SPBE Domain 2 - Tata Kelola SPBE Domain 3 - Manajemen SPBE Domain 4 - Layanan SPBE	3,15	3,20	3,40	3,60	3,12	3,12	-	-	3,40	3,60	Kendala yang ada muncul dalam pencapaian indikator Indeks SPBE tahun 2024, diantaranya: • Pada aspek kebijakan SPBE, Pemkab Tanah Laut belum menyusun kebijakan internal yang komprehensif terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, sistem penghubung layanan, dan Tim Koordinasi SPBE. • Pada aspek perencanaan strategis SPBE, Pemkab Tanah Laut belum melengkapi dan memenuhi ketentuan nasional beberapa dokumen yang berkaitan dengan perencanaan strategis SPBE meliputi

																dokumen arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, inovasi proses bisnis. • Pada aspek penyelenggara SPBE, Tim Koordinasi SPBE belum menyusun program kerja dan melaksanakannya sesuai program kerja tersebut. Tim Kolaborasi SPBE yang dibentuk belum melibatkan seluruh Perangkat Daerah. • Pada aspek manajemen SPBE, Pemkab Tanah Laut belum menyusun peta rencana dan pedoman pelaksanaan manajemen termasuk melaksanakan manajemen SPBE yang terdiri dari manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															manajemen layanan. • Peningkatan kompetensi SDM TIK belum mengacu pada kompetensi dalam bidang arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, arsitektur keamanan dan arsitektur layanan. • Pada kegiatan manajemen pengetahuan sudah diterapkan akan tetapi rencana kerja belum dicantumkan dalam bentuk peta rencana yang lengkap.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1. Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut.
2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut.
4. Pengelolaan persandian, keamanan informasi dan telekomunikasi.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

1. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Seluruh SKPD di Kabupaten Tanah Laut.
2. Pengoptimalan penggunaan Command Center.
3. Peningkatan kemampuan server pada sistem pusat data Pemerintah Daerah.
4. Pengembangan Aplikasi penunjang SPBE daerah yang dilengkapi dengan pengamanan aplikasi dan informasi sesuai dengan kriteria nasional.
5. Penyediaan dokumen tata kelola TIK sebagai referensi penerapan TIK.
6. Memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan media komunikasi publik sebagai media informasi pemerintah daerah.
7. Penyediaan data sektoral terpadu yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
8. Peningkatan pengamanan data dan informasi dokumen elektronik

menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dari BSSN.

Isu-isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi:

- Gambaran pelayanan
- Sasaran dan Kebijakan RPJMD periode 2025-2029
- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.
- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.
- Implikasi RTRW dan KLHS Kabupaten Tanah Laut.

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan dipecahkan dengan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penilaian SPBE di Kabupaten Tanah Laut

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

SPBE merupakan isu utama bagi unsur komunikasi dan informasi seluruh dinas komunikasi dan informatika Indonesia. Melalui SPBE ini

sistem pemerintahan diharapkan tidak secara manual lagi, tapi menggunakan sistem elektronik. Poin utama dalam SPBE adalah :

- Domain Kebijakan
- Domain Tata Kelola
- Domain Manajemen
- Domain Layanan

2. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

3. Pengelolaan data statistik sektoral pada Satu Data Tanah Laut

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan tahapan perencanaan dan pembangunan *data center* serta aplikasi dan infrastruktur penunjangnya dalam mendukung *Smart Government* menuju terwujudnya Satu Data Indonesia.

4. Pengelolaan persandian dan keamanan informasi

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak terhadap kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam sistem pemerintahan. Untuk menjamin keamanan dalam sistem aplikasi, maupun data, maka diperlukan sistem keamanan informasi yang bersifat preventif maupun penanganan kasus siber.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut melakukan penelaahan dan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun Kementerian/Lembaga.

Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan melalui top down Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1 Usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Tanah Laut
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Tanah Laut

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Sumber Usulan	Pola Kegiatan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						Top down
	2.16.03.2.02 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	- 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Tanah Laut	Penyediaan 4 unit perangkat GSM Booster untuk daerah blank spot	1.800.000.000,00	Top down	- e-purchasing	
JUMLAH				1.800.000.000,00			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu *Techno Economy*, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan, tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2026, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari misi Daerah yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari misi yang ada ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keberhasilan RPJMD melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dari telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut terkait dengan misi “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan dinamis”, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut merancang tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital
- Indikator Tujuan : Indeks Pemerintah Digital
- Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital
- Indikator Sasaran :
 - Tingkat Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital
 - Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Tabel 3.2.1
Tabel Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

NO	Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis digital	Indeks Pemerintah Digital	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital	• Tingkat Implementasi Aristektur Pemerintah Digital • Indeks Pengelolaan Teknologi Informasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tahun Anggaran 2026 merupakan pelaksanaan operasional yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029, program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut pada tahun Anggaran 2026 dijabarkan menurut 1 (satu) tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dimana setiap tujuan dijabarkan melalui kebijakan dan program, Secara lebih rinci rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dituangkan dalam tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		16.390.567.062,75							16.252.928.961,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		16.390.567.062,75								16.252.928.961,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		16.188.592.073,15								15.842.303.961,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.5 Nilai	5.823.557.485,72						-	7.010.430.074,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	87 Persen	4.302.130,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola	Dinas Kominfo Stasan	-	4.438.885,00	

											narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemerintahan yang Baik					
	2	1 6	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.072.970,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		3.061.300,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N
	2	1 6	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.229.160,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara	Dinas Kominfo Stasan		1.377.585,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N

												an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2	1 6	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.652.550.179, 00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan	-	4.420.286.826, 00	
	2	1 6	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/bula n	4.648.187.309, 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba,	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kominfo Stasan		4.414.929.551, 00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N

												judi, dan penyeludupan.	yang Baik				
	2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	4.362.870,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		5.357.275,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Persen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola	Dinas Kominfo Stasan	-	1.500.000,00	

											narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan yang Baik					
	2	16	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kominfo Stasan	-	80.000.000,00	

												judi, dan penyeludupan.	yang Baik				
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
		6	1	5	2		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
		6	1	5	9		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	30.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara	Dinas Kominfo Stasan		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

												an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2	1 6	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	530.311.009,72			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan	-	521.733.965,00	
	2	1 6	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	8.164.380,78	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi,	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola	Dinas Kominfo Stasan		10.230.778,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N

											narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemerintahan yang Baik					
	2	1 6	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	88.408.401,44	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		72.600.000,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N
	2	1 6	0 1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.389.097,50	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara	Dinas Kominfo Stasan		14.728.406,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N

												an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
		6	1	6	5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.007.200,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		24.918.713,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
		6	1	6	6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara	Dinas Kominfo Stasan		5.940.000,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N

												an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan/Material											
		6	1	6	7		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	18.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		18.150.000,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N
	2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		6	1	6	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	378.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara	Dinas Kominfo Stasan		302.442.525,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N

												an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2	1 6	0 1	2.0 6	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.841.930,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		72.723.543,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N	
	2	1 6	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	16.860.567,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba,	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kominfo Stasan	-	490.000.000,00	

												judi, dan penyeludupan.	yang Baik				
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		6	1	7	1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		6	1	7	2		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara	Dinas Kominfo Stasan		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

												an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Mebel											
		6	1	7	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N
	2	1	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		6	1	7	6		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	16.860.567,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara	Dinas Kominfo Stasan		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N

												an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2	1	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
	6	1	1	7	0		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		0,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N
	2	1	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
	6	1	1	7	1		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara	Dinas Kominfo Stasan		0,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N

												an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2	1 6	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	437.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan	-	1.241.555.988, 00	
	2	1 6	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	305.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba,	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kominfo Stasan		312.690.858,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N

												judi, dan penyeludupan.	yang Baik				
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		6	1	8	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	132.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		928.865.130,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	152.533.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kominfo Stasan	-	250.914.410,00	

												judi, dan penyeludupan.	yang Baik				
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		6	1	9	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.850.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		54.695.025,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		6	1	9	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	86.313.600,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara	Dinas Kominfo Stasan		84.043.575,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

												an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan Mebel											
		6	1	9	5		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N
	2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		6	1	9	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	27.370.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara	Dinas Kominfo Stasan		22.175.810,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N

												an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
		6	1	9	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	0 Unit	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Kominfo Stasan		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N
	2	1	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		6	1	9	1		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	0 Unit	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara	Dinas Kominfo Stasan		0,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N

												an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
2	2	1 6	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase SKPD yang mempublikasikan seluruh daftar informasi publik	78 Persen	3.920.418.206, 00						-	3.563.669.472, 00	
	2	1 6	0 2	2.0 1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi pembangunan daerah yang tersebarluaskan Persentase capaian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai SOP Persentase KIM yang aktif Persentase media komunikasi publik yang dikelola dengan baik dan terbarukan Persentase pengaduan yang terselesaikan sesuai SOP Persentase Sarpras dalam kondisi baik sesuai standar	750 Informasi 100 Persen 90 Persen 100 Persen 60 Persen	3.920.418.206, 00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarak at dan SKPD Lingkup Pemerint ah Kabupate n Tanah Laut	-	3.563.669.472, 00	
	2	1	0	2.0	001	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat											

		6	2	1	5												
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3 Komunitas	86.700.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat at dan SKPD Lingkup Pemerintah ah Kabupaten Tanah Laut		33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAAN
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik											
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permohonan	1.212.630.776,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat at dan SKPD Lingkup Pemerintah ah Kabupaten Tanah Laut		692.830.512,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAAN
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik											

						Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi	64.142.850,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		33.755.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik										
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	20 Media	2.457.010.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		2.674.848.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten										

							Jumlah Konten Informasi Publik	760 Konten	99.934.580,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		129.235.260,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Aplikasi dan Informatika	100 Persen	6.376.517.381,43						-	5.052.505.040,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang mendapat layanan e-government Persentase SKPD yang terlayani jaringan intra pemerintah Persentase titik lokasi yang terfasilitasi jaringan telekomunikasi	100 Persen 78 Persen 32 Persen	6.376.517.381,43			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD dan Masyarakat Kab. Tanah Laut	-	5.052.505.040,00	
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota											

							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	31 Perangkat Daerah	3.281.630.381,43	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD dan Masyarakat Kab. Tanah Laut		4.722.303.740,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo											
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	0 Dokumen	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD dan Masyarakat Kab. Tanah Laut		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE											

							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	3 Aplikasi	111.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD dan Masyarakat Kab. Tanah Laut		165.201.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1	0	2.0	003	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan											
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0 Aplikasi	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD dan Masyarakat Kab. Tanah Laut		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1	0	2.0	003	Penyediaan Akses Internet											

							Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	31 Perangkat Daerah	2.952.600.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD dan Masyarakat Kab. Tanah Laut		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1	0	2.0	003	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah											
							Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	31.287.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD dan Masyarakat Kab. Tanah Laut		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
4	2	1	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,4 Poin	68.099.000,00						-	215.699.375,00	

	2	1	0	2.0		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data akurat dan sesuai standar Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar data statistik	100 Persen 100 Persen	68.099.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut	-	215.699.375,00	
	2	1	0	2.0	001	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional											
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	90 %	50.099.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut		135.699.375,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	1	0	2.0	002	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral											

							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	4 Orang	18.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			76.926.000,00							153.525.000,00	
5	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAHAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,4 Poin	76.926.000,00						-	153.525.000,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data akurat dan sesuai standar Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar data statistik	100 Persen 100 Persen	76.926.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	153.525.000,00	

	2	2	0	2.0	001	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral											
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	90 %	31.350.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	2	0	2.0	002	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral											
							Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 Laporan	45.576.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		63.525.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			125.048.989,60							257.100.000,00	

6	2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	471 Angka	125.048.989,60					-	257.100.000,00		
	2	2	0	2.0		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan yang terselesaikan Persentase PD yang menerapkan TTE	100 Persen 80 Persen	125.048.989,60			Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD Lingkup Pembkab Tanah Laut	-	257.100.000,00	
	2	2	0	2.0	000 5	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	75.248.989,60	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNY A	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan	SKPD Lingkup Pembkab Tanah Laut		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIA N

											ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	yang Baik					
	2	2	0	2.0	000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah											
	1	1	2	1	7		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	40 Perangkat Daerah	25.575.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut		84.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	2	0	2.0	000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah											
	1	1	2	1	8												

						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	24.225.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 04. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut		92.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	J U M L A H							16.390.567.062,75							16.252.928.961,00	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai pelaksanaan tahun keempat dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

Rencana Kerja (Renja) berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pimpinan, manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mewujudkan *Good Governance*.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

5.2 Saran

Diharapkan semua elemen kelembagaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dapat melaksanakannya

dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pelaihari, Juni 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP. 19840320 200212 2 002



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 500.12.1/ 06 -DKISP/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.

PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 sebagaimana Diktum Pertama dimaksud mempunyai tugas :

1. melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut;
3. melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
4. melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;
5. melaksanakan penelaahan rancangan awal dan rancangan akhir rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026;
6. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut dengan arah rencana kerja pembangunan Kabupaten Tanah Laut;
7. melaksanakan penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan pohon kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut;
8. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka

optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait;

9. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renja SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA** Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Januari 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT,**



RIKA AMALIA, S.STP, M.Si
NIP. 19840320 200212 2 002

TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut;
2. Yth. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Tanah Laut;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
NOMOR : 500.12.1/ 06 - DKISP/I/2025
TANGGAL : 9 Januari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2026**

No.	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Tim	Instansi
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
2.	Sekretaris	Ketua Tim	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
4.	Kepala Bidang Komunikasi	Koordinator I	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
5.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Koordinator II	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Koordinator III	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
7.	Pejabat Fungsional Bidang Komunikasi	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
8.	Pejabat Fungsional Bidang Penyelenggaraan E-Government	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
9.	Staf Pelaksana Bidang Statistik dan Persandian	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut
10.	Staf Pelaksana di Sekretariat	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**RIKA AMALIA, S.STP,M.Si
NIP. 19840320 200212 2 002**